

KESIAPAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENERAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KABUPATEN ACEH TENGGARA

(Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara)

Garyko.S

NPP. 30.0048

Asdaf Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: samosirgarryko@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs Hadi Prabowo, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The slow digital transformation of local government is currently the focus of the author's problem, where from the point of view of the governance of the Southeast Aceh district, much is still manual and has not utilized information and communication technology. **Purpose:** The aim of this study is to determine the readiness of the Regional Government in implementing an electronic-based government system in the Aceh Tenggara district. **Method:** The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. To obtain data, researchers use primary data sources and secondary data and this research is expected to be able to convey the required data clearly. Data collection techniques through interviews and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the successful elements of implementing e-government which include support, capacity, value have not been fulfilled by the local government in implementing an Electronic-Based Government System so far there are only a few digital services that can be felt by the public, namely PPID and Pemkab Website. **Conclusion:** The Regional Government of Southeast Aceh District through the Southeast Aceh Regency Diskominfo is considered not to have proper readiness to implement an Electronic-Based Government System in the area. This can be assessed based on the theory used, it is proven that there is no support, political will and commitment from the local government to implement the system. Then in terms of capacity, namely Human Resources (HR), Budget, and Inadequate Infrastructure in the area. With such results, the Southeast Aceh District Government should first focus on the support and commitment of the leadership and prepare competent human resources, sufficient finance and complete technological infrastructure..

Keywords: Readiness for Implementation, Local Government, E-government.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital yang lambat pada pemerintahan daerah saat ini menjadi fokus permasalahan penulis, dimana dari segi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara masih banyak bersifat manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka menerapkan sistem pemerintahn berbasis elektronik pada kabupaten

Aceh Tenggara. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder serta penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan data yang dibutuhkan dengan jelas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu elemen sukses penerapan *e-government* yang meliputi support, capacity, value belum dapat terpenuhi oleh pemerintah setempat dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sejauh ini hanya ada beberapa layanan digital yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu PPID dan Website Pemkab. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara dinilai belum memiliki kesiapan yang layak untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan teori yang digunakan terbukti bahwa belum adanya dukungan, kemauan politik dan komitmen yang dari pemerintah setempat untuk menerapkan sistem tersebut. Kemudian dari segi kapasitas, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, dan Infrastruktur yang belum memadai di daerah tersebut. Dengan hasil seperti itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebaiknya terlebih dahulu untuk fokus kepada dukungan dan komitmen pimpinan serta mempersiapkan SDM yang berkomptensi, finansial yang cukup, dan infrastruktur teknologi yang lengkap.

Kata kunci: Kesiapan Penerapan ,Pemerintah Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan telah banyak menunjukkan perkembangan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dapat dilihat dari layanan pemerintah yang bersifat konvensional menuju ke modern melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna menciptakan serta mewujudkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparansi (Birokrasi Reformasi tahun 2018). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disebut juga dengan E-government atau Electronic Government menjadi sistem yang digunakan oleh pemerintah saat ini untuk mentransformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya bersifat manual menjadi berbasis elektronik atau digital (Pratama et al., 2021).

Pada penelitian ini, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi daerah yang dipilih oleh peneliti. Daerah tersebut dipilih karena peneliti melihat pemerintah kabupaten Aceh Tenggara masih menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara manual (observasi peneliti, 2022). Dengan kondisi seperti itu, maka akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tersebut menjadi kurang efektif dan efisien. Kemudian dari segi pelayanan sektor publik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara juga dinilai sama sekali belum menggunakan aplikasi dan sistem informasi sehingga pelayanan di daerah tersebut memiliki banyak kekurangan seperti data yang belum terpadu, pelayanan yang kurang efektif, efisien dan transparansi serta pelayanan akses informasi yang belum disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial.

Kekurangan yang telah dipaparkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara selayaknya perlu diperbaiki dengan cepat dan para pemangku kepentingan harus segera menyusun dan menyiapkan program khusus untuk dapat menerapkan sistem tersebut. Peneliti melihat berdasarkan visi misi daerah kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki misi yang mengarah kepada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga sangat perlu komitmen dari para stakeholders dan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tenggara untuk menyiapkan program atau misi yang mengarah ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Transformasi digital menjadi perhatian khusus dan menjadi keharusan yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pemerintahan dibidang birokrasi pemerintah dan pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu cara untuk memulai transformasi pemerintahan menjadi lebih modern dan digital. Adapun kesenjangan masalah yang diambil oleh penulis yaitu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah provinsi Aceh Tahun 2022, dimana Pemkab Aceh Tenggara mendapat nilai predikat ‘kurang’ dan menjadi salah satu daerah yang memiliki nilai yang sangat rendah seperti tabel yang dapat kita lihat dibawah ini.

Tabel 1.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2022

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemprov Aceh	2,76	Baik
2	Pemkot. Sabang	1,59	Kurang
3	Pemkot. Banda Aceh	3,15	Baik
4	Pemkot. Langsa	1,82	Cukup
5	Pemkot. Lhokseumawe	1,54	Kurang
6	Pemkab. Subulussalam	1,76	Kurang
7	Pemkab. Aceh Timur	2,29	Cukup
8	Pemkab. Aceh Barat	2,63	Cukup
9	Pemkab. Simeulue	1,16	Kurang
10	Pemkab. Bieruen	2,10	Cukup
11	Pemkab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
12	Pemkab. Aceh Tamiang	2,62	Baik
13	Pemkab. Nagan Raya	2,20	Cukup
14	Pemkab. Bener Meriah	2,60	Cukup
15	Pemkab. Aceh Barat Daya	1,62	Kurang
16	Pemkab. Aceh Besar	1,85	Cukup
17	Pemkab. Aceh Jaya	2,01	Cukup
18	Pemkab. Aceh Selatan	1,47	Kurang
19	Pemkab. Aceh Tengah	1,13	Kurang
20	Pemkab. Aceh Tenggara	1,65	Kurang
21	Pemkab. Aceh Utara	1,62	Kurang
22	Pemkab. Gayo Lues	1,62	Kurang
23	Pemkab. Pidie	2,03	Cukup
24	Pemkab. Pidie Jaya	1,54	Kurang

Sumber : Diolah Penulis 2022 Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan tabel data evaluasi SPBE provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak pemerintah daerah, ada sebanyak dua puluh empat pemerintah daerah kabupaten dan atau kota termasuk juga pemerintah provinsi yang dapat kita lihat nilai indeks dan predikat dari masing – masing daerah. Dalam data tabel

tersebut, semua daerah sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan yang terjadi pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 yang hanya 14 pemerintah daerah saja yang telah menerapkan sistem tersebut.

Masih banyak kabupaten di provinsi aceh yang memiliki nilai indek yang kurang dalam menerapkan SPBE dan perlu diketahui tantangannya. Salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tenggara yang termasuk mendapatkan predikat ‘kurang’ dalam menerapkan sistem tersebut. Padahal berdasarkan faktanya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dapat mempersiapkan yang berkaitan dengan potensi yang mampu untuk menerapkannya. Potensi yang dimaksud adalah karena daerah tersebut memiliki jarak yang cukup dekat dengan Provinsi Sumatera Utara salah satunya yaitu Kota Medan. Seperti yang diketahui kota tersebut memiliki perkembangan yang cukup cepat dan sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kesiapan pemerintah maupun konteks penerapan sistem pemerinthan berbasis elektronik. Penelitian Widya Kurniati Mohi dan Nuzlan Botutihe berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Widya & Nuzlan, 2020), mengungkapkan bahwa Strategi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari strategi dan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah tersebut. Faktanya beberapa aktivitas pelayanan publik sudah berbasis online dan aplikasi. Walaupun begitu tetap masih ada kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengolaan sistem aplikasi online dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian Hamrun (2020:78) menemukan bahwa yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-government Di Kabupaten Muna”, menggunakan strategi Persiapan, Pematangan, Pemanapan, dan Pemanfaatan sebagai langkah-langkah yang digunakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik di daerah tersebut.

Penelitian Joko Tri Nugraha (2018:11) yang berjudul “E-government Dan Pelayanan Publik Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintahan Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian tersebut adalah agar *e-government* dapat berjalan maksimal maka diperlukannya tiga elemen yang harus dipersiapkan yaitu support, capacity dan value yang jelas serta membuat grand design pengembangan e-government di daerah tersebut. Disamping itu tidak lupa juga untuk menyiapkan penganggarannya dan menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian IT atau memiliki latar belakang pendidikan teknologi .

Penelitian Muhammad Jabarnur Aldiansa (2022:10) yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari”. Hasil penelitian tersebut bahwa terdapat salah satu layanan SPBE yaitu aplikasi LAIKA (Layanan Publik Integrasi Kendari). Layanan tersebut bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atau mengurus berbagai keperluan seperti perizinan, pengecekan pajak dan lain-lainnya secara online, serta aplikasi LAIKA dijadikan sebagai metadata yang artinya satu data terintegrasi untuk menghubungkan antar instansi.

Penelitian I Wayan Muka , Made Adi Widyatmika ,dan I Ketut Gede Darma Putra (2020:274) yang berjudul “Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali”. Dalam penelitian ini para penulis menggunakan jenis metode penelitian evaluasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta menentukan rencana strategis guna meningkatkan indeks keberhasilan SPBE khususnya di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kelemahan utama

dalam penerapan SPBE di provinsi Bali yaitu belum terintegrasinya sistem atau aplikasi dan masih kurangnya sumber daya manusia serta infrastruktur elektronik di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkhusus yang melayani publik langsung. Berdasarkan hasil observasi juga beberapa OPD menunjukkan masih kurangnya jumlah sistem/aplikasi yang dimiliki, tipe aplikasi, kepemilikan aplikasi atau sistem, platform dan ketersediaan server di tiap-tiap OPD.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni ingin mengetahui dan menganalisa suatu daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi sehingga sulit menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah tersebut. Metodenya yang digunakan menggunakan mix methods juga berbeda dengan penelitian Jabarnur Aldiansa, Hamrun maupun I Wayan Muka dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Indrajit (Indrajit, 2016) yang menyatakan bahwa elemen sukses penerapan e-government terdiri dari 3 elemen yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value*

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Tenggara.

II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam dengan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan (Sugiyono, 2016:9). Metode tersebut juga didasari pada filsafat postpositivisme yang nantinya akan digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang bersifat alamiah atau sebagai lawannya ialah eksperimen dimana peneliti dapat sebagai instrument kunci atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dapat bersifat induktif atau kualitatif, dan terakhir hasil penelitiannya lebih menekankan suatu makna daripada generalisasinya.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap empat orang informan yang terdiri dari kepala Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara, Sekretaris Diskominfo, Kabid Teknologi Informasi, dan Kebid Komunikasi dan Informasi Publik. Dalam menganalisa kesiapan pemerintah daerah tersebut penulis menggunakan teori tiga elemen sukses *e-government* (Indrajit, 2016) yaitu yang pertama *Support* yang berisi dukungan pemerintah dan kebijakan politik pimpinan. Kedua, *Capacity* yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan kelengkapan infrastruktur. Ketiga, *Value* merupakan nilai atau hasil yang dapat dirasakan oleh penggunaannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan teori dari Indrajit yang menyatakan bahwa ada tiga sukses e-government, yaitu Dukungan (*Support*), Kapasitas (*Capacity*), Nilai Atau Hasil (*Value*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dukungan(*Support*)

Hal pertama dan terpenting yang harus dimiliki pemerintah adalah dukungan dari berbagai tokoh publik dan politik agar benar-benar memiliki program khusus dalam rangka menerapkan konsep *e-government*, tidak hanya berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif tetapi harus memiliki fokus yang jelas pada prinsip-prinsip *good governance* (Indrajit, 2016). Di bawah ini berikut penjelasan elemen *Support* :

3.1.1. Kemauan Politik (*Political Will*)

Tanpa perspektif "kemauan politik" ini, beberapa proyek pengembangan *e-government* pada pemerintahan daerah akan gagal. Hal tersebut diakibatkan karena gaya manajemen pemerintahan yang bersifat "top down". Jelas ini akan sangat berpengaruh besar terhadap program dan kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Begitu juga halnya jika ingin menerapkan program *e-government* yang efektif, titik awal harus berada di tingkat pemerintahan tertinggi sebelum beralih ke yang lebih terendah. Penulis mencoba menganalisa "kemauan politik" kepala daerah sebagai pembuat kebijakan dan program pemerintah daerah dari aspek visi dan misi selama menjalani pemerintahan. Adapun visi tersebut yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera" sementara misi yang berkaitan dengan transformasi digital atau sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah misi keempat yang berisi " Tersedianya Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dan misi kelima "Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Inovatif, dan Keterbukaan Informasi yang Terintegrasi"

Berdasarkan visi misi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki fokus dan arah untuk mentransformasi sistem pemerintahan menjadi digital. Hal tersebut juga didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Diskominfo sebagai *leading sektor* SPBE yang mengatakan bahwasanya pemerintah kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki kemauan atau kebijakan politik yang jelas dan terarah terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3.1.2. Komitmen

Adanya suatu komitmen berarti suatu organisasi memiliki keinginan kuat untuk berusaha semaksimal mungkin agar tercapai sesuai dengan keinginan dan tujuan organisasi. Setiap pemerintah pusat maupun daerah pasti perlu memerlukan suatu komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemerintahannya.

Peneliti melalui beberapa indikator dukungan telah melakukan kegiatan wawancara kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengetahui bagaimana dengan komitmen pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka menerapkan SPBE di daerah tersebut dan hasil wawancara dan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa "Diskominfo Aceh Tenggara sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan kepada Pimpinan daerah untuk dapat segera diterapkannya SPBE ini. Tetapi Pimpinan belum dapat menyetujui karena beberapa alasan terkait dengan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah belum memiliki komitmen yang jelas terhadap SPBE"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan bahwasanya pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki komitmen yang jelas untuk menerapkan SPBE di daerah tersebut.

3.1.3. Sosialisasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha organisasi untuk mempelajari sesuatu hal baru yang memiliki nilai dan pemahaman serta manfaat baru bagi masyarakat yang menerimanya.

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Diskominfo Aceh Tenggara terkait dengan sosialisasi SPBE dan hasil wawancara tersebut sulit dilakukannya sosialisasi dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda dua tahun lalu.

Sosialisasi terkait penerapan SPBE tidak sempat dilakukan oleh Diskominsa Aceh, akan tetapi pihak mereka melakukan cara lain yaitu menawarkan untuk segera mengirimkan orang sebagai perwakilan untuk disosialisasikannya SPBE tersebut, akan tetapi tidak ada perwakilan yang mendatangi Kominsa Aceh dikarenakan sistem anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Aceh Tenggara yang dinilai rumit oleh aparaturnya pemerintahan.

3.2. Kapasitas (*Capacity*)

Elemen kedua ini merupakan salah satu unsur kemampuan dan keberdayaan dari organisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan SPBE menjadi kenyataan. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah dalam elemen ini , yaitu :

3.2.1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan teori dan konsep e-government Indrajit, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dan dibutuhkan dalam penerapan SPBE. Sumber daya tersebut juga harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat mengelola Teknologi Informasi dan dapat mengoperasikan berbagai sistem informasi dan aplikasi pemerintahan. Dalam hal ini penulis telah menyajikan data pegawai Diskominfo sebagai berikut :

Tabel 2.

Daftar pegawai Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022

Jumlah Pegawai	Pendidikan Bidang Non	Pendidikan bidang
	TIK	TIK
PNS	26	0
Honorar	5	0
Jumlah	31	0

Sumber: Diskominfo Aceh Tenggara, 2022

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan tidak ada satupun pegawai Diskominfo Aceh Tenggara yang memiliki pendidikan dibidang Teknologi Informasi atau sebagainya. Sementara itu banyak diisi oleh pegawai dengan bidang pendidikan lain. Dengan ini menunjukkan bahwa Diskominfo Aceh Tenggara kekurangan tenaga ahli IT dimasa sekarang yang serba digital.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang teknologi informasi masih dinilai kurang dalam segi jumlahnya. Salah satu faktornya juga karena selama tahun Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak membuka dan menerima Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2019 sampai 2022. Sehingga sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkembang dan hanya mengandalkan tenaga honorar saja.

3.2.2. Sumber Daya Finansial

Anggaran merupakan salah satu indikator terpenting dalam penerapan SPBE di suatu daerah. Mengingat seluruh rencana dan program kerja pasti membutuhkan anggaran. Peneliti berkesempatan melihat alokasi dana terkait dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun data tersebut telah diolah oleh penulis kedalam benyuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Aceh Tenggara Tahun 2022

Uraian	Belanja Operasi (Rp)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	346.930.200,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	346.930.200,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	164.490.200,00
Pelayanan Informasi Publik	140.020.000,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	42.420.000,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	171.186.000,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.800.000,00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	59.800.000,00
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.386.000,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	81.520.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	29.866.000,00
Jumlah	1.554.348.600

Sumber : diolah penulis berdasarkan DPA Diskominfo Aceh Tenggara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dinilai dana yang dialokasikan pada program yang berkaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih terbilang cukup kecil dan menurut Kepala Diskominfo kabupaten Aceh Tenggara, alokasi dana tersebut masih jauh dari harapan untuk memulai dan mempersiapkan penerapan pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal anggaran yang dialokasikan pada Diskominfo sesuai dengan penelitian yang ingin dicapai, peneliti berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatakan bahwa :

“ Anggaran di pemerintah daerah kabupaten dan Diskominfo Aceh Tenggara memang dinilai kurang mendukung apalagi untuk menerapkan SPBE di daerah ini, itu pastinya membutuhkan anggaran dan perencanaan yang sangat besar, jadi dari segi anggaran atau dana Pemerintah Daerah belum siap untuk menerapkan sistem tersebut di kabupaten Aceh Tenggara ini” (31/01/2023)

Berdasarkan data tabel 3 yang telah diolah penulis dan hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat anggaran menjadi salah satu masalah utama yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan yang berbasis digital, sehingga dapat dikatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara dari segi anggaran masih dinilai belum layak.

3.2.3. Kelengkapan Infrastruktur

Ada beberapa infrastruktur yang menjadi faktor utama dalam mendukung dan menerapkan SPBE, diantaranya adalah :

1. Pangkalan Data (server)

Pangkalan Data atau lebih dikenal dengan server merupakan salah satu perangkat komputer yang memiliki sumber daya yang besar dan layanan khusus yang bertujuan untuk menyimpan data di komputer atau perangkat lainnya (client). Server juga memiliki jenis yang memiliki fungsinya sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti halnya web server yang memiliki fungsi yaitu sebagai penyimpan data website serta menjalankan website tersebut.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pangkalan data yang dimiliki oleh Diskominfo Aceh Tenggara terjawab dengan hasil wawancara dengan Kabid Teknologi Informasi yang mengatakan bahwa Hasil pengamatan oleh penulis bahwa saat ini Diskominfo Aceh Tenggara belum memiliki pangkalan data atau server sendiri untuk menyimpan data jaringan yang diperlukan untuk menerapkan SPBE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki kesiapan dari segi pangkalan data atau server.

2. Koneksi Tower dan Jaringan

E-government tidak dapat dijalankan tanpa adanya suatu jaringan provider dan tower disuatu daerah. Ini karena jaringan provider dan tower berfungsi untuk memberikan sinyal dan koneksi agar dapat diakses individu atau kelompok dimanapun mereka berada atau dengan kata lain perangkat mereka saling terhubung dengan suatu sistem online. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Tenggara telah memiliki tower jaringan yang tersebar di 14 kecamatan dan 42 desa dan dinilai sudah dapat mencakup jaringan internet. Dengan hasil tersebut tersebut dapat menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Daerah dari segi Jaringan dan Tower yang dinilai sudah cukup untuk menerapkan SPBE di Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3. Nilai atau Hasil (Value)

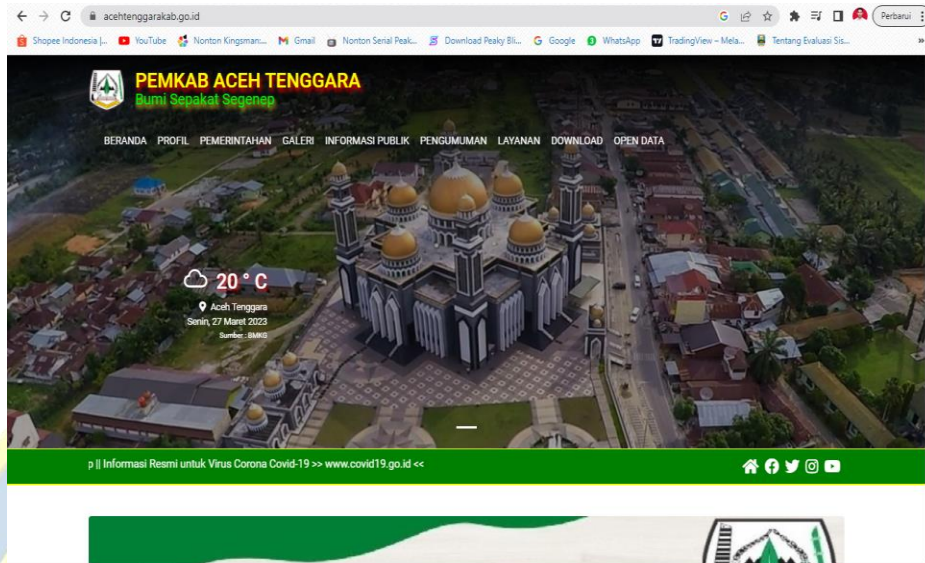
Selama ini manfaat yang dapat diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal menyebarluaskan informasi publik atau pelayanan informasi publik dapat adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Saat ini Diskominfo Aceh Tenggara sudah berhasil mempublikasikan 16 informasi, akan tetapi jumlah itu masih sangat kurang dibandingkan dengan informasi-informasi yang seharusnya dipublikasi setiap waktunya. Perlu koordinasi yang kuat antara perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam hak publikasi informasi agar masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat merasa terbantu dengan informasi yang ingin didapatkan tanpa harus melalui permohonan informasi ke Diskominfo. Secara kesimpulannya bahwasanya dalam memberikan layanan informasi yang berupa peraturan, surat edaran atau kebijakan lainnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara hanya melalui website PPID Aceh Tenggara yang itupun perlu informasi yang lebih banyak lagi.

2. Situs Web Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara

Website atau situs pemerintah kabupaten Aceh Tenggara adalah satu bentuk pelayanan dan penyampaian informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Hanya saja website tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang segera perlu diperbaiki. Terutama layanan yang belum dapat digunakan serta informasi berita yang belum *up to date*. Apalagi website tersebut menjadi situs utama yang bisa diakses oleh pengguna internet yang ingin mendapatkan berbagai informasi seputan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara. Berikut adalah gambar tampilan situs Pemkab Aceh Tenggara.



Sumber : Website Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 1. Tampilan Situs Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tenggara juga menggunakan website Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan beberapa informasi yang berupa seperti berita-berita, dokumentasi, dan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Bukan berarti sistem pemerintahan berbasis elektronik belum diterapkan, maka informasi dan berita seputaran kegiatan pemerintahan tidak dapat dipublikasikan secara *online* dan terbuka. Dapat disimpulkan website Pemkab Aceh Tenggara telah membantu pemerintah setempat dalam hal menyebarkan informasi.

3. Radio Aceh Tenggara (Radio Agara)

Dinas komunikasi dan inormatika kabupaten Aceh Tenggara juga dibantu oleh Radio Agara 98,2 FM dalam menyebarkan berbagai informasi pemerintahan secara lisan kepada masyarakat. Biasanya informasi yang sering disiarkan adalah seperti harga-harga bahan pokok, informasi pemadaman listrik, acara pameran dan pertunjukan kesenian serta mempromosikan atau mengiklankan produk-produk dagang dan jasa setempat. Berikut adalah gambar studio penyiaran radio Agara 98,2 FM.



Sumber : LAKIP Diskominfo Aceh Tenggara

Gambar 2. Radio Agara 98.2 FM

Berdasarkan gambar 3.2 sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi masih menjalankan dan mengoperasikan layanan penyiaran radio sebagai bentuk pelayanan dan penyebaran informasi pemerintahan dan berita-berita seputaran Kabupaten Aceh Tenggara melalui Radio Agara 98,2 FM. Banyak Pemerintah daerah di Indonesia sudah menerapkan SPBE di masing-masing daerah. Apalagi dimasa yang serba digital ini tuntutan transformasi digital dalam aktivitas dan pekerjaan pemerintahan sudah sangat perlu dilakukan. Tujuan utama yang dapat dirasakan setelah menerapkan sistem tersebut adalah layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang bersifat digital. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat langsung menarik kesimpulan bahwasanya belum ada nilai dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan belum adanya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di kabupaten Aceh Tenggara.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak semata-mata hanya sebuah cita-cita, tetapi. Perlu sebuah kesiapan yang dapat dijadikan strategi oleh pemerintah daerah dalam menyusun rencana penerapan SPBE. Penulis menemukan temuan penting yakni kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dianalisa menggunakan teori Indrajit support, capacity, dan value. Sama halnya dengan temuan Widya Kurniati Mohi dan Nuzlan Botutihe bahwa strategi yang digunakan dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gorontalo melalui teori Indrajit *support, capacity, value* sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari strategi dan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah tersebut. Faktanya beberapa aktivitas pelayanan publik sudah berbasis online dan aplikasi. Walaupun begitu tetap masih ada kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengolahan sistem aplikasi online dan infrastruktur yang belum merata.

Pemerintah Indonesia termasuk responsif dalam mengembangkan e-government. Hal tersebut dapat dilihat dari hadirnya situs-situs pemerintah pusat dan daerah. Walaupun pengembangan situs e-government semakin menyeluruh dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota, tetapi banyak juga realisasi pembangunan sistem e-government dinilai tidak berhasil, sebab ketidaksiapan pemerintah. Maka dari itu, kesiapan pemerintah pusat dan daerah perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan bahwa kehadiran sistem tersebut tidak hanya berlangsung sementara, melainkan sistem dapat berfungsi secara berkelanjutan. Ada beberapa dasar yang digunakan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah yakni, adanya rencana induk, tingkat layanan, informasi yang selalu terkini, serta *database system* yang berfungsi untuk mendukung segala bentuk layanan., layaknya temuan (Sutedjo,2016)

Ada juga layanan yang sudah dipersiapkan dalam penerapan SPBE seperti penelitian Aldiansa, yang mengatakan bahwa terdapat salah satu layanan SPBE yaitu aplikasi LAIKA (Layanan Publik Integrasi Kendari). Layanan tersebut bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atau mengurus berbagai keperluan seperti perizinan, pengecekan pajak dan lain-lainnya secara online, serta aplikasi LAIKA dijadikan sebagai metadata yang artinya satu data terintegrasi untuk menghubungkan antar instansi layaknya penelitian (Aldiansa, 2022)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Daerah ternyata belum memiliki kesiapan yang layak dan baik dalam rangka mewujudkan dan menerapkan e-govrnment di Kabupaten Aceh Tenggara. Ini dapat dilihat dari kebijakan pimpinan

yang belum ada mengarah kepada SPBE, SDM yang belum memadai, Anggaran yang masih sedikit, dan infrastruktur teknologi yang belum lengkap.

2. Adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka menerapkan e-government seperti Pimpinan dan pejabat Pemerintah daerah yang belum memiliki dukungan *political will* atau kemauan politik dan komitmen selama beberapa tahun terakhir semenjak Perpres No.95 Tahun 2018 diterbitkan. Selanjutnya kendala dibagian capacity atau kapasitas yang masih jauh dalam kata siap untuk menerapkan SPBE tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari Sumber Daya Manusia atau ASN Diskominfo tidak memiliki latar pendidikan IT atau belum adanya tim ahli IT di dinas tersebut. Selama ini masyarakat kabupaten Aceh Tenggara hanya dapat merasakan pelayanan informasi berbasis internet yang bersumber dari Website Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan berbasis Radio yaitu Radio Agara 98,2 FM. Ini menunjukkan bahwa kesiapan dari segi sistem informasi yang sudah berjalan hingga sekarang ini pun belum dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan PPID dan kualitas website Pemkab Aceh Tenggara yang sederhana dan masih banyak memiliki kekurangan dibagian konten dan tampilannya.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, referensi dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis juga menyadari masih barunya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Tenggara guna untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara beserta jajarannya dan seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansya, M. J. (2018). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64.
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 115.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., Gde, I. K., & Putra, D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang akan dilaksanakan adalah Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali.” Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253–271.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Pratama, R. A., Meigawati, D., & Mulyadi, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Sukabumi Particioatory Responder (Super) Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Sukabumi Oleh : 8.